



## Memahami Konsep, Jenis, Prinsip Serta Teori Dalam Pengeluaran Pemerintah

Elivia Pasma Putri

Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University, Ogan Ilir, Post Code 30662

### Article History

Received : 04-May-2025  
Revised : 25-July-2025  
Accepted : 20-September-2025  
Published : 01-October-2025

**Keywords:** Concept, Theory, Expenditure, Government, State Finance

**Corresponding author:**  
[epasmaputri@gmail.com](mailto:epasmaputri@gmail.com)

**DOI:**  
<https://doi.org/10.61476/jf7cv240>

### ABSTRACT

*Government spending is a very important part of an economic system, namely where the government has the absolute right to participate in every economic activity, where the government not only allocates goods but also participates in managing goods and services, increasing international sales, economic stability, and encouraging accelerated economic growth. Government spending includes a number of planning, implementation, and evaluation activities in order to achieve development goals; government spending functions to provide public services, infrastructure, and social security needed to improve the welfare of the community. In each government period, spending policies are often determined based on various development priorities, ranging from education and health to infrastructure development. The research conducted by the author uses a qualitative method with a literature study approach starting from collecting, analyzing, and organizing sources from articles, books, and research, then concluding and finally presenting complete information about government spending. This research aims to understand the importance of the effectiveness and efficiency of government spending; therefore, through this article, the concept of government spending, types of government spending, principles of government spending, and expenditure theory will be discussed.*

### ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian peran yang sangat penting dalam suatu sistem ekonomi yakni dimana pemerintah memiliki hak mutlak berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana pemerintah tidak hanya mengalokasikan barang tetapi juga ikut dalam hal mengelola barang dan jasa, meningkatkan penjualan internasional, stabilitas ekonomi, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencakup

sejumlah rangkaian kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi guna mencapai tujuan pembangunan, pengeluaran pemerintah berfungsi untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan jaminan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap periode pemerintahan, kebijakan pengeluaran sering kali ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan yang beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dimulai dari mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian kemudian disimpulkan dan terakhir disajikan informasi secara lengkap mengenai pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, maka dari itu melalui artikel ini, akan dibahas mengenai konsep pengeluaran pemerintah, jenis-jenis pengeluaran pemerintah, prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah, serta teori pengeluaran.

©2025, Elivia Pasma Putri

This is an open access article under CC BY-SA license



## PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian peran yang sangat penting dalam suatu sistem ekonomi yakni dimana pemerintah memiliki hak mutlak berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana pemerintah tidak hanya mengalokasikan barang tetapi juga ikut dalam hal mengelola barang dan jasa, meningkatkan penjualan internasional, stabilitas ekonomi, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menjabarkan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi, yakni; (1) fungsi

alokasi adalah tugas pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan mengoptimalkan pemakaiannya. (2) fungsi distribusi, adalah tugas pemerintah untuk mengatur distribusi pendapatan dan perusahaan untuk berkembang. (3) fungsi Stabilisasi adalah bagaimana pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang maju (Ranifial Anugra,2016).

Dalam segi alokasi ini sangat berkaitan dengan konsep pengeluaran keuangan pemerintah yang mencakup sejumlah rangkaian kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi guna mencapai tujuan pembangunan, pengeluaran pemerintah berfungsi untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan jaminan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap periode pemerintahan, kebijakan pengeluaran sering kali ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan yang beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Pengeluaran yang efektif dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, pengeluaran pemerintah yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengelola pengeluaran dengan bijaksana, terutama dalam situasi krisis ekonomi.

Oleh karena itu, perlunya untuk memahami pentingnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, maka dari itu melalui artikel ini, akan dibahas mengenai konsep spengeluaran pemerintah, jenis-jenis pengeluaran pemerintah, prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah, serta teori pengeluaran pemerintah.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Publik**

Sebagaimana yang kita tau bahwa konsep keuangan publik merupakan suatu cangkupan yang sangat berperan penting dalam mendukung kemajuan perekonomian negara. Berasal dari dua kata utama, yaitu “keuangan dan publik”. Menurut (Ridwan dan Inge, 2023), Keuangan merupakan Ilmu dan Seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transfer ruang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Sementara kata “publik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai orang banyak (umum); semua orang yang datang

(menonton, mengunjungi, dan sebagainya).\*

Jadi di sini, dapat dimengerti bahwa keuangan publik merupakan suatu seni dan ilmu dalam mengelola keuangan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, terkadang mengapa keuangan publik juga disebut dengan keuangan negara, karena konteks negara terutama negara demokrasi sama-sama membahas mengenai lingkup orang banyak/publik (Dandung et al., 2020). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No.17 Tahun 2003: butir 3 bahwa keuangan publik merupakan “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Ini mengartikan bahwa keuangan publik atau juga disebut dengan keuangan negara merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam mengelola keuangan negara secara luas baik berupa uang maupun barang. Keuangan publik disini telah menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah karena di dalamnya mengandung sebuah dampak yang cukup signifikan bagi kemaslahatan orang banyak (Tafriji Biswan, 2022).

Berdasarkan pada pengertian keuangan publik di atas, maka penulis simpulkan bahwa keuangan publik merupakan suatu bentuk hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengelolaan dana/aset baik berupa uang ataupun barang yang digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Sementara untuk ruang lingkup keuangan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Maka dari itu, lingkup keuangan publik sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tersebut, sebagai berikut.

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

- b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan negara dan penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- g) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Tidak hanya itu, perumusan lingkup keuangan negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Menurut sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi lain, proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Serta dalam sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari ruang lingkup keuangan publik di atas, bahwa pada dasarnya keuangan publik mencakup hak, kewajiban, pengeluaran,

pendapatan, baik dari APBN dan APBD serta keseluruhan kekayaan negara unit-unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan milik negara.

### **B. Tugas Pemerintah dalam Mendukung Perekonomian**

Menurut buku *Public Finance and Public Policy*, Prof. Gruber (2018) sebagaimana (*public finance*) adalah *the study of the role of the government in the economy*, maka dari itu pemerintah memiliki peran yang lingkupnya amat luas, seperti mendorong pertumbuhan yang tinggi, lapangan kerja, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) tumbuh berkembang serta memberikan keputusan-keputusan yang amat andil dalam mendukung kebijakan keuangan publik pemerintah. Hasil dari keputusan yang diambil pemerintah ini akan sangat besar dampaknya pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta pada suatu wilayah kekuasaannya.

Dalam lingkup negara modern, fungsi pemerintah dalam mendukung perekonomian modern, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1993:2). Menurut Musgrave dan Musgrave (1984:6) fungsi alokasi ditujukan untuk penyediaan barang-barang publik melalui berbagai kebijakan yang bersifat mengatur (*regulatory policies*), yakni bagaimana agar sumber daya yang ada dapat digunakan untuk menghasilkan barang privat dan barang publik secara seimbang. Fungsi distribusi menekankan pada bagaimana agar terjadi keseimbangan dan keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi menekankan pada penggunaan kebijakan anggaran (*budget policy*) sebagai alat untuk menjaga ketersediaan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam mendukung perekonomian di suatu negara mencakup sebagai fasilitator penyediaan kesempatan kerja, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang memadai serta pembentukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan sumber informasi melalui buku-buku, peraturan pemerintah, artikel ilmiah serta literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti (Nashrullah et al., 2023). Menurut Badjari (2015:153), penelitian kualitatif memerlukan tingkat kepekaan yang tinggi. Peneliti harus terlibat secara mendalam dalam suatu komunitas untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang situasi atau pengalaman tertentu (Yusanto, 2020). Sementara pendekatan studi kepustakaan menurut sugiono dalam (Ansori et al., 2019) adalah kajian teoritis dari referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya serta norma yang berkaitan dengan fenomena/situasi yang diteliti.

Data diperoleh dari studi kepustakaan merupakan semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dalam memperoleh informasi, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu. Kemudian peneliti menyimpulkan serta menyajikan informasi secara lengkap mengenai pengeluaran pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengeluaran Pemerintah**

Sebagai bagian dari APBN dan APBD, pengeluaran pemerintah merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mencakup seperangkat produk yang dihasilkan dengan berbagai pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal (Nahumuri, 2019). Menurut (Sukirno) dalam Azwar (2016)(Azwar, 2016), konsep pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yang merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah.

Sejalan dengan pendapat sukirno, Aries Djaenuri (2016), mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (publik) adalah sejumlah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah. Pendanaan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut harus menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Perpektif berbeda dikemukakan oleh Intan Safitri, (2016), bahwa Pengeluaran pemerintah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dana yang digunakan oleh sektor publik untuk membeli produk dan layanan seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan menurut Suparmoko dalam penelitian yang dikemukakan oleh (Alapján-, 2016). Pengertian pengeluaran pemerintah disamaartikan dengan belanja pemerintah yang melibatkan jenis dan sifat pengeluaran yang diperlukan dalam segala bentuk pengadaan barang publik, alokasi produksi serta implementasi berbagai program kebijakan yang mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan segala bentuk belanja pemerintah yang ditujukan untuk penggunaan ataupun pengadaan barang/jasa terhadap masyarakat yang dinyatakan dalam satuan uang dan diatur dalam APBN atau APBD.

## **B. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintahan mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan penggunaan dana publik dengan tujuan untuk menunjang tercapainya program yang telah dibuat. Tentunya, dalam hal ini pasti pemerintah mengklasifikasin beberapa jenis pengeluaran pemerintah ke dalam kriteria tertentu. Menurut Suparmoko dalam Widayanti (2018)(Widayanti, 2018) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah disamartikan dengan pengeluaran negara yang terdiri dari berbagai segi yaitu sebagai berikut.

Suparmoko menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah menurut organisasi, terdiri dari 3 golongan yaitu:

a. Pemerintah Pusat

Pengeluaran didasarkan untuk kepentingan pemerintah pusat sesuai yang termaktub dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yaitu suatu dana yang digunakan untuk penyelenggaraan masyarakat secara luas, dari sabang sampai merauke. Berdasarkan APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2 pengeluaran belanja dan pembiayaan.

b. Pemerintah Provinsi

Pengeluaran pemerintah provinsi termuat dalam APBN yang merupakan hasil dari suatu dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan juga hasil pungutan pajak dari semua masyarakat. Pengeluaran Pemerintah Provinsi yang termuat pada APBN digunakan pengeluaran belanja seperti belanja operasi dan modal.

c. Pemerintah Kabupaten atau Kota

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten atau Kota yang dimaksud ini digunakan untuk belanja, pembagian hasil dengan pendapatan untuk desa/kelurahan serta hibah atau pemberian sukarela.

Pengeluaran Negara memiliki 2 macam pengeluaran Negara, yaitu menurut organisasi dan sifat.

Sedangkan pendapat Reza, et al (2023)(Reza et al., 2023) menambahkan jenis pengeluaran pemerintah berdasarkan jenisnya, yaitu:

a. Pengeluaran Investasi merupakan suatu pengeluaran yang bertujuan guna kekuatan dan pertahanan ekonomi untuk masa yang akan datang biasanya ini penguatan terhadap siklus perputaran ekonomi yang berdampak pada pendapatan negara.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang ditujukan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat yang lebih inklusif.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat, pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemakmuran, kemandirian dan kemaslahatan bersama.

- d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan, menjadi suatu jenis pengeluaran yang tidak mendapatkan kegunaan secara langsung, tetapi apabila dikeluarkan pada saat ini akan mengurangi pengeluaran di masa yang akan datang, contohnya efisiensi anggaran.
- e. Pengeluaran yang tidak Efektif, suatu pengeluaran yang hanya hanya bermanfaat oleh pemerintah dan tidak memiliki manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari jenis-jenis pengeluaran pemerintah di atas, bahwasanya ada banyak sekali jenis pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi kategori tertentu, di sini penulis memberikan jenis pengeluaran pemerintah berdasarkan tiga golongan, yaitu pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah provinsi dan pengeluaran pemerintah Kabupaten atau Kota. Sedangkan pengeluaran menurut sifatnya dibagi menjadi Pengeluaran Investasi, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat, Pengeluaran Penghematan Masa Depan serta Pengeluaran yang tidak Efektif.

### **C. Prinsip-Prinsip Pengeluaran Publik**

Prinsip-prinsip Pengeluaran Pemerintah Hamdani et al., (2023)(Hamdani et al., 2023), yaitu:

- a. Prinsip moralita, mengandung arti bahwa setiap pengeluaran pemerintah hendaknya dilaksanakan senantiasa berpijak dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan falsafah bangsa . Dasar moral ini menjadi panutan dan akan menjadi landasan bagi setiap Lembaga Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, pengalokasian, implementasi serta evaluasi anggaran.
- b. Prinsip nasionalitas, pengeluaran pemerintah diwujudkan dan dijalankan oleh pemerintah serta di arahkan untuk mencapai tujuan Negara secara nasional/menyeluruh.
- c. Prinsip kerakyatan, pengeluaran pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaran pemerintah.
- d. Prinsip rasionalita, setiap tindakan pemerintah dalam rangka pengeluaran pemerintah harus didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang rasional dan yang objektif serta logis.

- e. Prinsip fungsionalita pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, perencanaan, dan pengawasan maka setiap lembaga negara dan pejabat negara mendasarkan pada fungsi dan wewenangnya berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Prinsip perkembangan, pengeluaran pemerintah didasarkan atas memepertimbangkan jangka panjang dan dinamika masyarakat.
- g. Prinsip keseimbangan dan keadilan, pengeluaran yang ada melalui yaitu mencakup pengeluaran yang adil dan merata baik dari segi pendidikan, kesehatan, pangan, papan, dan sandang, keamanan, kenyamanan, keselamatan.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah mencakup prinsip moralita, nasionalita, prinsip kerakyatan, prinsip rasionalita, prinsip perkembangan, serta prinsip keseimbangan dan keadilan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan keuangan negara yang efektif, efisien dan ekonomis.

#### **D. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Teori mengenai pengeluaran pemerintah yang dilansir dari Mangkoesoebroto dalam Azwar (2016)(Azwar, 2016) memberikan macam pengeluaran pemerintah, yaitu :

##### **1. Teori Rostow dan Musgrave**

Teori ini dikenal juga dengan teori pembangunan negara yang mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut yang mana ketiga tahapan tersebut kemudian dihubungkan dengan pengeluaran pemerintahnya. Pada tahap awal, perbandingan antara pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dengan pendapatan nasional (*national income*) terbilang cukup besar. Pada tahap kedua, yakni tahap menengah pembangunan ekonomi dimana semakin banyaknya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*). Tahap lanjutan, Rostow mengatakan bahwa terjadi perpindahan pada aktivitas pemerintah dari penyediaan sarana prasarana ke belanja pemerintah untuk kegiatan sosial (Mangkoesoebroto, 2000) dalam Zulfiransyah, (2022).

Sementara itu, Musgrave dalam tahap lanjutan ini mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, rasio antara investasi swasta terhadap GNP. (*Gross*

*National Product*/Produk Nasional Bruto)-nya akan semakin besar, tetapi rasio antara investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tahap ini, terjadi peningkatan permintaan terhadap barang-barang pribadi seperti mobil atau motor karena penghasilan masyarakat yang semakin besar (Nahumuri, 2019).

## **2. Teori Adolf Wagner**

Sejalan dengan pendaat dari Rostow, Adolf Wagner dalam N. Gregory Mankiw (2017)(Tafriji Biswan, 2022) memberikan pandangan yang berbeda bahwa pengeluaran pemerintah semakin lama semakin meningkat. Intinya dari teori ini, yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner juga menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per-kapita meningkat maka secara otomatis pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah perlu mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Selain itu meningkatnya belanja pemerintah juga disebabkan karena terjadinya urbanisasi, meningkatnya pendapatan masyarakat, tuntutan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, berkembangnya ekonomi dan demokrasi, serta ketidakefisienan birokrasi pemerintah.

## **3. Teori Peacock & Wiseman**

Selanjutnya, Teori Peacock-Wiseman mengutarakan bahwa teori pengeluaran pemerintah yang lebih menekankan pada pola waktu dan perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat *continuous growth*, melainkan seperti tangga rumah (*step like*). Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memperbesar penerimaan dari sektor pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk

membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai niat dalam tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori ini juga mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena : 1). efek penggantian (*displacement effect*), yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. 2). efek inspeksi (*inspection effect*), yaitu adanya aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang; dan 3). Efek konsentrasi (*concentration effect*), adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta.

Berdasarkan pada teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Teori Rostow dan Musgrave mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut yang mana ketiga tahapan tersebut kemudian dihubungkan dengan pengeluaran pemerintahnya. Teori Peacock-Wiseman mengutarakan bahwa teori pengeluaran pemerintah yang lebih menekankan pada pola waktu dan perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat *continuous growth*, melainkan seperti tangga rumah (*step like*). Dan terakhir teori Adolf Wagner dalam N. Gregory Mankiw (2017)(Tafriji Biswan, 2022) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah semakin lama semakin meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengeluaran pemerintah merupakan segala bentuk belanja pemerintah yang ditujukan untuk penggunaan ataupun pengadaan barang/jasa terhadap masyarakat yang dinyatakan dalam satuan uang dan diatur dalam APBN atau APBD.
2. Pengeluaran pemerintah berdasarkan tiga golongan, yaitu pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah provinsi dan pengeluaran pemerintah Kabupaten atau Kota. Sedangkan pengeluaran menurut sifatnya dibagi menjadi Pengeluaran Investasi, Penciptaan Lapangan Pekerjaan,

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat, Pengeluaran Penghematan Masa Depan serta Pengeluaran yang tidak Efektif.

3. Prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah mencakup prinsip moralita, nasionalita, prinsip kerakyatan, prinsip rasionalita, prinsip perkembangan, serta prinsip keseimbangan dan keadilan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan keuangan negara yang efektif, efisien dan ekonomis.
4. Kemudian teori-teori dari Teori Rostow dan Musgrave, Teori Peacock-Wiseman Dan terakhir teori Adolf Wagner dalam N. Gregory Mankiw (2017) telah memperkaya pengetahuan ini menjadi lebih kompleks sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengetahuan selanjutnya.

### Saran

Penulis memberikan saran bahwa perlu adanya upaya yang lebih optimal bagi pemerintah dalam memastikan anggaran, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran untuk dapat lebih efektif dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alapján-, V. (2016). *Pengeluaran Pemerintahan*. 1–23.
- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110–115. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Jawa, Amtiran and Ndoen/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p167-178. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 167–178.
- Hamdani, I., Sri Nesta, N., Rahmawati, J., & Hidayat, F. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 187–203.

- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Reza, D., Ramadhani, D., Mahfudzoh, N., Ramadhani, D. K., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1-15.
- Tafriji Biswan, A. (2022). *Keuangan Publik: Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik*.
- Widayanti, W. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara 2018*. 1-49.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>